



Investor Diminta Lapor Kejaksaan

BCW Minta Komisi I Blak-blakan

MANGUPURA - Dugaan adanya praktik pemerasan terhadap investor pengusaha hotel di Badung terus mendapat perhatian masyarakat luas. Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora, dengan tegas meminta DPRD Badung khususnya Komisi I yang dituding melakukan pungutan liar diminta blak-blakan bersikap. Sebagai lembaga wakil rakyat, dewan ditantang membeberkan fakta kepada masyarakat bahwa praktik pungli tersebut tidak benar, atau setidaknya tidak pernah terjadi.

"Guna membersihkan nama dewan, maka dewan harus berani membuka diri. Kalau memang tidak pernah terjadi pemerasan harus dibuktikan dengan fakta yang jelas," tandas Dwikora kepada *Jawa Pos Radar Bali* kemarin (30/6). Dwikora menyebut untuk mencari tahu kebenaran dugaan pungli tidak terlalu sulit. Komisi I harus berani menelusuri hotel atau investor mana yang pernah disidak, siapa saja anggota dewan yang ikut sidak. Hal itu untuk memastikan tidak ada keterlibatan

anggota dewan. Jika sudah ditelusuri tidak terbukti, maka bisa saja ada oknum atau orang lain yang mengaku anggota dewan.

Dwikora juga meminta Badan Kehormatan (BK) serta unsur pimpinan dewan turun tangan secara serius menyelesaikan masalah yang terjadi. Pasalnya, jika dibiarkan terus menggelinding, maka citra dewan akan ternoda. Bahkan, Dwikora meminta BK dan unsur pimpinan dewan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran. "Sebagai shock therapy pada mereka yang melakukan, harus ditindak tegas," imbuh pria asal Tabanan ini.

Selain itu, Dwikora juga mendorong investor untuk melapor kepada penegak hukum jika memang merasa dirugikan. Investor bisa menunjukkan bukti atau saksi saat terjadi transaksi atau permintaan dari oknum anggota dewan. Menurut Dwikora, investor bisa melapor kepada Kejaksaan ataupun kepolisian terhadap kasus ini.

Sementara itu, ketua Komisi I DPRD Badung Nyoman Ardana saat dikonfirmasi terpisah kembali membantah adanya pemerasan dan pungli. Ardana

malah menuding balik jika kabar tersebut hanya untuk mengganggu ketenangan lembaga dewan. "Ada orang luar yang ingin men-

di dalam," dalih Ardana tanpa menyebutkan siapa pihak yang dia maksud mengganggu dewan. Nah, yang menarik, Ardana

pemerasan mencuat terkait salah satu hotel di Nusa Dua, Kuta Selatan yang bermasalah perizinanya. (san/han)

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal. : 24



Lima Fraksi Respons WTP Gianyar

GIANYAR - Pasca Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan Pengantar Bupati Gianyar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 beberapa hari lalu. Kemarin (30/6), giliran lima Fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan pandangan mereka melalui Rapat Paripurna II di Gedung DPRD Gianyar.

Pantauan koran ini dalam Rapat Paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPRD I Made Togog menunjukkan, secara umum kelima Fraksi menyampaikan apresiasi mereka atas kinerja eksekutif. Apalagi Gianyar sukses mendapatkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah 2014 lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali.

Selain itu, apresiasi itu disampaikan juga tak lepas dari raihan Gianyar sebagai kabupaten terbaik dalam ajang *Indonesia's Attractiveness Award 2015* dari majalah *Tempo*. Hingga masuknya Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata sebagai salah seorang dari tiga besar nominator Anugerah Seputar Indonesia (ASI) kategori pemerintahan berprestasi.

Meski begitu, dalam pandangan kelima fraksi tersebut, mereka tetap memandang perlu dilakukan peningkatan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Meski pun untuk beberapa sektor, seperti pada pendapatan daerah sudah mengalami peningkatan.

Selain itu, dari paparan kelima fraksi itu juga disoroti mengenai nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada anggaran 2014. Silpa inilah yang menurut Dewan perlu penjelasan lebih lanjut, termasuk menyarankan kepada eksekutif supaya lebih cermat dalam perencanaan dan penyerapan anggaran,



NYOMAN WIDIADNYANA/RADAR BALI

PUJIAN DAN KRITIKAN RAPAT PARIPURNA: DI Gedung DPRD Gianyar kemarin, selain mengkritisi eksekutif, DPRD bangga atas raihan WTP.

sehingga WTP itu bisa dipertahankan.

Dimulai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yang dibacakan I Nyoman Amerthayasa, yang dalam pandangannya menitikberatkan pada usulan perlunya pengangkatan guru-guru tidak tetap. Disusul kemudian Fraksi Golkar yang dibacakan Ngakan Ketut Putra dengan menyatakan perlunya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gianyar.

Lalu Fraksi Demokrat yang dibacakan AA Gede Bawa Hartawan menekankan pentingnya memperhatikan soal etika, tata krama, prosedur, dan mekanisme dalam menjalankan tugas bagi pejabat. Disusul I Gusti Ngurah Agus Supriadi perwakilan dari Fraksi Gerindra, yang giliran menyoroti masalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). "Di samping itu, perlu dijelaskan juga mengenai masih kosongnya dua jabatan direksi PDAM," ucap Agus Supriadi.

Sedangkan Fraksi Hanura Nasdem yang dibacakan I Nyoman Artawa Putra pada intinya lebih menanyakan langkah dan solusi yang dilakukan eksekutif dalam mengatasi masalah kemacetan Ubud di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan.

Wakil Ketua DPRD Gianyar

Made Togog yang memimpin jalannya Rapat Paripurna menyatakan, rapat paripurna lanjutan akan dilaksanakan pada 3 Juli mendatang. Sedangkan rapat kemarin sendiri dihadiri Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata, Wabup Made Mahayastra, unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) hingga pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unsur terkait lainnya. (wid/djo)

Edisi : Rabu, 1 Juli 2015

Hal. : 23